

BAB III

GATEKEEPING* PEMBERITAAN DI *SUARA MERDEKA

Munculnya *civil society* dalam hal kepemilikan media pada awalnya memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemilik media namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pertarungan kekuatan antar para pemilik modal, hingga pada akhirnya kontrol terhadap media massa dengan sendirinya mengalami pergeseran dari konsep *civil society* menjadi konsep *power capital* dengan kewenangan dan kontrol media sepenuhnya terletak dan dipengaruhi oleh segelintir orang yang biasa kita sebut sebagai pemilik modal.

Dari sekian banyak media massa yang berkembang di Indonesia pada umumnya bersifat *private-owned* media, dimana kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta ataupun perorangan. Kecendrungan ini menyisakan kekhawatiran terutama yang berkaitan dengan pemberitaan dan pembentukan opini publik. Dalam kerangka pembentukan opini publik sendiri, biasanya media massa melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*) dan ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*) dan ketika melakukan tiga tindakan tersebut media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai politik pemberitaan, kepentingan dari pemilik media dan faktor eksternal seperti tekanan pasar, pembaca dan kekuatan-kekuatan luar lainnya. Dengan demikian, bisa jadi

sebuah peristiwa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan tiga tindakan tersebut. Di tambah lagi dengan adanya hegemoni yang tidak seimbang dimana pada akhirnya dapat mengancam demokrasi itu sendiri.

Sebuah media tidak begitu saja dipandang sebagai wilayah netral di mana berbagai kepentingan dan interpretasi dari berbagai kelompok ditampung. Media menjadi subjek yang dapat mengkonstruksikan sebuah realitas berdasarkan pemahamannya sendiri lalu disebarakan kepada publik. Kesibukan utama media massa adalah menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi sebuah wacana yang bermakna. Media juga sering dijadikan sebagai sumber legitimasi dari mereka yang memiliki kuasa. Didalamnya, mereka yang berkuasa atas media dapat dengan mudah memupuk kekuasaannya tanpa disadari oleh publik, dengan melibatkan sebuah pemaknaan secara terus-menerus diantaranya melalui agenda setting pemberitaan.

Jika media memberi tempat pada sebuah berita maka berita tersebut akan memperoleh perhatian dari publik. Besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah berita amat bergantung terhadap seberapa besar media memberikan perhatian pada berita tersebut. Media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi masyarakat, apa yang disajikan media, itu pula yang akan diingat oleh publik. Inilah salah satu dampak dari agenda setting media yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kuasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka.

Berita merupakan salah satu produk media yang dihasilkan melalui sebuah sistem yang dimiliki oleh organisasi media, didalamnya terdapat sebuah mekanisme yang dilakukan untuk membatasi para pekerjanya dalam menyampaikan informasi agar tetap sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik. Berikut ini adalah hasil temuan penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya proses *gatekeeping* yang dilakukan oleh *Suara Merdeka* dalam memberitakan sosok Kukrit Suryo Wicaksono sebagai CEO *Suara Merdeka* dalam pemberitaan tentang pemilihan ketua Kadin Jateng periode 2011-2016 yang dirangkum dari lima informan.

3.1 Sensor Diri

Sensor diri adalah sebuah intuisi yang terdapat dalam diri setiap individu yang bertugas memberikan sinyal-sinyal tertentu yang memungkinkan setiap individu mampu mendeteksi setiap kemungkinan yang datang menghampiri pikiran dan perasaan, sebelum memutuskan untuk bertindak melakukan sesuatu.

Dalam hal mencari berita, biasanya seorang wartawan tanpa disadari melakukan sensor diri yang merupakan proses menyeleksi diri sendiri yang dilakukan wartawan agar berita yang mereka dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin perusahaan tempat ia bekerja.

Berita-berita yang wartawan dapat kemudian masih harus melewati banyak tahap penyeleksian. Istilah lain dari sensor diri, yang seringkali dilakukan oleh *gatekeeper* adalah proses *gatekeeping*. Tahap penyeleksian ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang dilakukan oleh perusahaan, untuk menjaga

agar para pekerjanya tetap berada pada jalur yang sudah digariskan oleh perusahaan.

3.1.1 Proses *gatekeeping* pemberitaan di *Suara Merdeka*

Proses *gatekeeping* yang dimaksud adalah proses penyeleksian berita pada media. *Suara Merdeka* yang merupakan satu dari sekian banyak media di Jawa Tengah yang konsern di bidang pemberitaan, dalam proses produksi beritanya juga melakukan proses *gatekeeping*. Menurut informan 2, proses *gatekeeping* adalah pelaksanaan standar operasional prosedur yang berdasarkan pada kaidah-kaidah jurnalisme. Jadi setiap berita yang masuk ke *newsroom Suara Merdeka* akan diteruskan ke bagian editor kemudian dilakukanlah beberapa tahap penyeleksian untuk memilih berita yang dianggap memiliki unsur nilai berita yang baik, sebab tidak mungkin jika semua berita yang masuk ke ruang redaksi akan dimuat dan berita-berita yang diturunkan harus memenuhi etika standar jurnalistik, standar teknis jurnalistik dan diminimalkan untuk tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Jadi ada banyak sekali tahapan pengendalian yang dilakukan oleh *Suara Merdeka* sebelum akhirnya sebuah berita sampai ke pembaca.

Pada tahap inilah dituntut kecermatan para *gatekeeper* dalam menentukan berita mana saja yang layak dan tidak layak untuk dimuat setiap harinya. *Gatekeeper* adalah sebutan dari orang-orang yang melaksanakan proses *gatekeeping*. *Gatekeeper* di *Suara Merdeka* sendiri dimulai dari redaktur bidang, redaktur halaman, kemudian redaktur pelaksana, dan dalam politik pemberitaan yang lebih luas bisa sampai ke pemimpin redaksi. Fungsi utama dari *gatekeeper*

adalah menyaring dan mengolah informasi yang masuk ke ruang redaksi sebelum informasi tersebut sampai ke publik, setiap *gatekeeper* mempunyai *news judgement* tersendiri terhadap sebuah berita dan mereka memiliki hak untuk menentukan *angle* pemberitaan dengan memberikan penonjolan-penonjolan tertentu terhadap sebuah pemberitaan.

Kecenderungan sebuah media menganggap isu-isu tertentu lebih penting dibandingkan dengan isu-isu lainnya juga merupakan hasil dari proses *gatekeeping* itu sendiri dan pada akhirnya isu tersebut akan menjadi sebuah agenda media. Seperti yang dikatakan oleh informan 3, bahwa,

“proses gatekeeping dilakukan melalui proses pengujian yang bersifat internal dan eksternal. Internal berhubungan dengan masalah teknis standar jurnalistik sedangkan eksternal berhubungan dengan bagaimana memperlakukan berita, agenda media yang akan dibuat seperti apa atau kebijakan tertentu apa terhadap suatu peristiwa dengan mempertimbangkan pengaruh yang akan muncul dan sifatnya terkait dengan politik pemberitaan”.

Setiap organisasi media mempunyai kebijakan tersendiri dalam menetapkan sebuah agenda yang akan membentuk pemberitaan. Para *gatekeeper* akan terlebih dulu memilih berita-berita apa saja yang penting di dunia hari ini atau berita apa saja yang menjadi perbincangan hangat hari ini, kemudian akan diangkat menjadi topik pemberitaan.

Sesungguhnya realitas media tidaklah mutlak merupakan cerminan dari realitas yang sebenarnya. Sebab media sendiri merupakan sebuah organisasi yang melibatkan orang-orang dengan kepentingan yang berbeda-beda, memiliki visi dan misi, komitmen serta prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh termasuk dalam hal bisnis dan redaksional.

Pengaruh dari organisasi media ini cukup besar terhadap sebuah kebijakan media khususnya dalam politik pemberitaan, karena penentu kebijakan pada sebuah media dalam menentukan sebuah pemberitaan tetap dipegang oleh pemimpin tertinggi dalam organisasi media yang notabene adalah *owner*. *Owner* adalah pemilik yang mendirikan media dalam kepemilikan korporasi ataupun tidak yang menduduki posisi top ranking di organisasi media. Kebijakan dari pemilik sebuah organisasi media ini lebih kuat dibandingkan dengan level yang lainnya. Kekuatan pemilik inilah yang sering digunakan untuk menghasilkan surat kabar dalam bentuk sesuai dengan keinginan yang pemilik setuju, hal ini dilakukan dengan cara menekan para *gatekeeper* mereka, padahal para *gatekeeper* memiliki otoritas yang cukup kuat dalam perusahaan namun ternyata tidak lebih kuat dari pemilik.

Dalam organisasi media terdapat sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengontrol bagaimana produk media dihasilkan oleh para pekerja media, termasuk di dalamnya mengontrol pemberitaan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan kelompok dominan seperti pemilik, pemerintah, pengiklan dan lain sebagainya.

Di *Suara Merdeka* sendiri *owner* telah memberikan kepercayaan sepenuhnya pada redaksi, terkait dengan pemberitaan tentang dirinya. Salah satunya adalah ketika pemilik mencalonkan dirinya sebagai kandidat ketua Kadin Jawa Tengah periode 2011-2016. Publik dapat melihat dengan jelas beberapa pemberitaan yang terkait dengan pemilik dalam porsi yang besar, hal ini dilakukan karena memang ada kebijakan-kebijakan tertentu terkait hal tersebut di

Suara Merdeka dan inilah realitas pemilik yang memanfaatkan media sebagai ajang pencitraan bagi dirinya. Hal ini dibenarkan oleh informan 3, bahwa

“memang ada sejumlah kebijakan yang harus diamankan, apakah itu pemilik ataupun agenda setting redaksi sendiri yang membutuhkan sebuah penyikapan yang kuat.”

Selain berkaitan dengan kepentingan pemilik, proses *gatekeeping* juga berkaitan dengan aturan-aturan dan kebijakan lain yang ada dalam perusahaan seperti berita apa yang diangkat berdasarkan pada gaya dan *style* pemberitaan di *Suara Merdeka*. Misalnya saja dalam pemilihan gambar dan pemilihan headline. Semua disesuaikan dengan gaya pemberitaan di *Suara Merdeka* dan disesuaikan dengan segmentasi pembaca *Suara Merdeka* itu sendiri.

Secara teknis sesekali proses *gatekeeping* yang dilakukan oleh *Suara Merdeka* dapat menghambat penyampaian sebuah reportasi dan editorial, meskipun proses tersebut sudah masuk dalam sistem yang sudah tersistem namun beberapa kebijakan dari organisasi memungkinkan adanya kegiatan mengontrol informasi sehingga pada akhirnya akan menghambat proses penyampaian informasi kepada publik. Namun sebagai sebuah sistem yang terstruktur segala kebijakan apapun yang mengalir harus tetap dijalankan oleh pekerja media dan ketika sebuah informasi tidak diberitakan oleh media maka informasi tersebut tidak akan pernah sampai kepada publik dan tidak akan menjadi realitas sosial. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 1 bahwa,

“ ketika sebuah berita meskipun dimuat tetapi esensi dari beritanya tidak kelihatan maka penyampaian informasi kepada publik tentu akan terhambat”.

Proses *gatekeeping* yang dilakukan di *Suara Merdeka* bukannya tanpa kendala misalnya saja ketika ada pemberitaan yang terkait dengan kolega dekat pemilik, ketika hal tersebut terjadi biasanya pihak redaksi akan meminta peninjauan ulang dan meminta konfirmasi pada pihak-pihak yang terkait kemudian terlebih dahulu mendiskusikannya kepada pemilik, kemudian tinggal menunggu keputusan dari pemilik apakah berita tersebut dimuat atau ditempatkan di halaman berapa, jadi berita tersebut tidak sekedar langsung tidak dimuat. Selain itu ketika ada kebijakan - kebijakan tertentu yang dibuat misalnya oleh Pemimpin Redaksi, maka tinggal bagaimana dikomunikasikan dengan struktur-struktur yang ada kemudian nantinya akan ada yang mengamankan hal tersebut.

Proses *gatekeeping* ini secara tidak langsung dapat membuat para pekerja media tetap berada pada jalurnya, Karena pekerja berada dalam sebuah sistem untuk kepentingan bisnis, maka hal ini penting untuk mengatur orang, mengatur alur kerja dan lainnya agar wartawan menulis berita tepat waktu, deadline pengiriman berita ditepati, kemudian deadline cetak juga tepat waktu dan pendistribusiannya kepada pembaca juga tepat pada waktunya. Jadi semua proses yang dilakukan dari saat berita didapat hingga dicetak semua sudah *on the track*. Menurut informan 3,

” inilah yang mengatur tata cara wartawan dalam bekerja dengan mengikuti corporate culture yang ada.”

Corporate culture atau budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi pegangan sumberdaya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan juga perilakunya di dalam sebuah organisasi. Nilai-nilai inilah yang akan memberi jawaban apakah suatu tindakan itu benar atau salah dan apakah suatu perilaku

dianjurkan atau tidak, jadi nilai-nilai inilah yang berfungsi sebagai landasan bagi setiap pekerja. Jadi mau tidak mau, setiap pekerja di *Suara Merdeka* harus mematuhi alur yang sudah digariskan oleh perusahaan.

Oleh karena itu secara teknis kadangkala proses *gatekeeping* dapat merugikan para pekerja dalam berkarya, sebab mereka harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemimpin mereka. Seperti yang diungkapkan oleh informan 1 bahwa:

“ketika sebuah pasukan sampai ditingkat lini bawah harus memegang komando dari pemimpin perusahaan, pekerja media harus mengikutinya dan pasti ini akan merugikan.”

Apalagi jika ada kebijakan-kebijakan yang belum tentu sesuai dengan sisi idealisme jurnalistik pekerja, bisa jadi karena politik pemberitaan ataupun *policy* nya. Seperti ketika seorang pekerja harus mengatakan A sementara perkembangannya dilapangan lebih dari A maka hal tersebut tentu akan mengakibatkan pekerja media tidak mampu mengekspresikan sisi idealisme jurnalistik mereka secara tuntas sebab seperti harus ada yang di tahan demi kebaikan diri mereka sendiri ataupun demi menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pada dasarnya proses *gatekeeping* memang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses produksi berita. Melalui beberapa level yang ada dalam proses *gatekeeping* baik level internal maupun eksternal, kita dapat melihat sejauh mana setiap level mampu mempengaruhi sebuah berita, dimulai dari awal bagaimana berita didapatkan dari sumber sampai dengan menjadi sebuah berita

yang siap dikonsumsi oleh pembaca dan semua pesan pasti mengalami segala jenis pengurangan, penambahan dan perubahan penekanan dan kadang hal tersebut dapat menghilangkan unsur objektivitas dan independensi dari pekerja media.

Jadi intinya, proses *gatekeeping* dapat menjadi kekuatan yang efektif sekaligus menjadi sesuatu yang berbahaya dalam sebuah proses produksi berita, sebab mekanisme kontrol bisa dilakukan didalamnya tanpa di sadari oleh para pekerja media itu sendiri.

3.2 Pertimbangan Ideologis

Pertimbangan ideologis maksudnya adalah sebuah cara yang mampu menjelaskan mengapa pekerja dari sebuah media menghasilkan laporan seperti itu dan tidak seperti ini. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh ideologi yang ditanamkan oleh media kepada pekerjanya yang akhirnya berpengaruh dalam rutinitasnya. Seperti contoh seorang wartawan meliput berita dengan memihak terhadap satu pandangan saja atau menempatkan pandangan yang satu lebih penting dengan pandangan yang lain. Inilah sebenarnya wujud dari pencerminan ideologi yang dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap pekerja.

3.2.1 Visi dan misi *Suara Merdeka*

Visi yang dimaksud adalah tujuan besar yang akan dicapai nanti kedepannya. Jika suatu perusahaan tidak mempunyai visi maka perusahaan tersebut akan bermasalah, sebab tidak punya pemikiran ke depan. *Suara Merdeka*

yang merupakan satu dari sekian banyak perusahaan media yang konsern di bidang pemberitaan, pada awal kehadirannya mempunyai misi untuk memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka. Aspirasi dan juga suara hati nurani rakyat di anggap penting untuk ditampung oleh media yang dikelola para pejuang pers. Sedangkan dalam sisi praksis, penerbitan koran ini dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja dan berperan serta dalam pembangunan.

Dalam perkembangannya para pengasuh koran ini mencanangkan *Suara Merdeka* sebagai koran nasional yang terbit di Semarang, hal ini juga tak terpisahkan dari misi awal, walaupun pada hakikatnya lebih terkait dengan tuntunan komitmen ideal sekaligus kesadaran akan potensi posisi pasar koran ini dalam perspektif bisnis.

Sedangkan misi adalah cara dan tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jika sebuah perusahaan media tidak terdapat misi maka akan terjadi kebingungan terhadap apa yang akan dikerjakan dalam perusahaan tersebut. Misi dari *Suara Merdeka* sendiri sudah ditanamkan oleh pendirinya H. Hetami dengan memiliki pedoman yang terarah demi mencapai satu tujuan yaitu (1) menjadikan *Suara Merdeka* sebagai sumber kebutuhan informasi demi kemajuan bangsa; (2) memberi nikmat kepada pengasuh *Suara Merdeka*; (3) memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.2.2 Tagline *Suara Merdeka*

Tagline merupakan salah satu atribut dalam sistem identitas yang menggambarkan esensi, personality maupun positioning brand yang kuat. Tagline diciptakan untuk menanamkan citra sebuah perusahaan ke dalam benak publik dan memberikan kesadaran pada publik akan kehadiran produk tersebut. Tagline yang baik akan langsung dapat tertanam di benak publik yang sekaligus menghubungkannya dengan produk tertentu dan yang paling penting adalah memiliki makna yang berkaitan dengan produk.

Pada awal berdirinya, Tagline dari *Suara Merdeka* adalah “Harian Umum-untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia”. Kemudian Tagline tersebut berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna, menjadi “Independen, Obyektif, tanpa Prasangka”. Tagline tersebut bukanlah semboyan yang asal pasang, melainkan merupakan dasar idealisme pengelolaan redaksional sehari-hari.

Independen sendiri berarti ingin menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Apa yang diberikan dan yang dikemukakan sebagai pendapat, selalu berdasarkan kepada keyakinan dan rasa tanggung jawab sendiri. Obyektif berarti pemberitaannya tidak diwarnai oleh pamrih, dan harus selalu *cover both sides* atau seimbang bahkan dalam dinamika sekarang harus *cover many sides*, sebab kalau dicampuri pamrih tentulah bisa lain makna dan sifatnya dan yang terakhir, tanpa prasangka berarti setiap wartawan dalam membuat berita harus bebas dari opini pribadi. Dalam memberikan penilaian tentang sesuatu

selalu dilakukan dengan hati dan pikiran terbuka serta menjauhkan diri dari sangka buruk ataupun sangka baik.

Seiring dengan perubahan politik yang terjadi di Indonesia, persaingan media menjadi meningkat ditambah lagi dengan munculnya otonomi daerah yang melahirkan pula koran-koran komunitas berbasis pasar di kabupaten/kota mengakibatkan terjadinya perebutan pasar di Jawa Tengah. Untuk tetap survive *Suara Merdeka* menerapkan strategi mendekati diri dengan basis pelanggan di Jawa Tengah dengan mengganti tagline “Independen, Objektif, Tanpa Prasangka” yang sebenarnya merupakan cerminan dari prinsip-prinsip jurnalisme bermutu (*excellence journalism*) menjadi “Perekat Komunitas Jawa Tengah” yang sesungguhnya merupakan pernyataan posisi (*positioning statement*), di mana dalam teori pemasaran (*marketing*), *positioning* menunjukkan persepsi konsumen terhadap suatu produk. Jadi jika *Suara Merdeka* menetapkan “Perekat Komunitas Jawa Tengah” sebagai tagline, itu artinya *Suara Merdeka* ingin dipersepsi oleh konsumen sebagai perekat komunitas di masyarakat Jawa Tengah.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Jawa Tengah sendiri terdiri dari beberapa subkultur seperti subkultur Banyumas, Solo, Muria, Pati, Kudus dan lainnya. Setiap subkultur tumbuh dan mempunyai karakteristik berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah otomatis setiap subkultur tersebut mempunyai kepentingan masing-masing sebab didalam subkultur terdapat orang-orang yang mempunyai kepentingan seperti Bupati dan Wakil Bupati yang punya kepentingan atau Gubernur yang punya kepentingan dan lain sebagainya. Maka fungsi dari *Suara Merdeka* adalah mencoba merekatkan setiap kepentingan

tersebut. *Suara Merdeka* menjadi moderator dari masyarakat Jawa Tengah yang heterogen, jadi antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Jawa Tengah bisa direkatkan melalui *Suara Merdeka*. Hal ini dipertegas oleh pendapat dari informan 3, bahwa arti dari motto tersebut

“ adalah sebuah keinginan dari *Suara Merdeka* untuk menjadi konektivitas antara komunitas di satu region dengan region yang lain.”

Positioning Suara Merdeka ini dikemas mengikuti dinamika masyarakat, perkembangan zaman, termasuk perubahan paradigma di dunia informasi dan komunikasi. Independensi, objektivitas dan prasangka bukanlah nilai yang mutlak, melainkan sebuah dimensi yang penuh gradasi, artinya orang tidak lagi bertanya apakah suatu media independen, objektif atau tidak berprasangka, tetapi bertanya seberapa jauh independensi, objektivitas dan tingkat prasangkanya. Karena itu bagi *Suara Merdeka*, independensi, objektivitas dan tanpa prasangka tetap menjadi kiblat pemberitaan meskipun mustahil untuk tercapai seratus persen.

Dengan menggeser taglinenya menjadi “Perekat Komunitas Jawa Tengah”. Maka *Suara Merdeka* sebenarnya ingin dipersepsikan sebagai kekuatan yang hidup dan berkembang serta ikut mempersatukan berbagai kepentingan komunitas yang ada di wilayah Jawa Tengah. Pemahaman tersebut kemudian direalisasikan oleh *Suara Merdeka* dengan melibatkan orang-orang *Suara Merdeka* untuk aktif dalam berbagai organisasi. Mulai dari pemimpin tertinggi *Suara Merdeka*, Budi Santoso yang aktif diberbagai bidang organisasi seperti Gapensi, Kadin, Hipmi, Serikat Penerbit Surat Kabar hingga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal tersebut juga diikuti oleh Kukrit Suryo

Wicaksono sebagai generasi ketiga, ia juga aktif di beberapa organisasi seperti Hipmi, Pertina, Ikatan Motor Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, dan lain sebagainya.

Keaktifan dalam beberapa organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat menyebarluaskan citra positif dan kedepannya bisa menciptakan reputasi positif bagi *Suara Merdeka*. Dan untuk makin menguatkan tagline *Suara Merdeka* sebagai perekat komunitas Jawa Tengah tersebut maka dibentuklah beberapa komunitas yang digagas oleh *Suara Merdeka* seperti *Suara Merdeka Golf Club*, *Suara Merdeka Fun Bike* dan lain sebagainya.

3.2.3 Pandangan pemilik dalam mengelola *Suara Merdeka*

Sebagai penerus generasi ketiga, Kukrit Suryo Wicaksono mempunyai pandangan kedepan tentang bagaimana mempertahankan *Suara Merdeka* agar tetap menjadi koran terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Tengah. Dalam pandangannya tiap generasi memiliki zamannya sendiri dan tiap zaman memiliki tantangannya sendiri maka tantangan itu tidak hanya sekedar sebagai tantangan melainkan juga sebagai peluang. Itulah prinsip yang digunakannya dalam menyikapi suatu proses regenerasi.

Dalam buku yang berjudul “Arus Generasi Pengemas Informasi”, yang dikeluarkan pada saat *Suara Merdeka* merayakan hari jadinya ke-60 tahun, Kukrit menulis bahwa generasi ketiga adalah generasi yang akan terus memajukan perusahaan bahkan mengembangkannya dengan lebih baik lagi kedepannya dan

sukses tidaknya *Suara Merdeka* di masa depan akan sangat tergantung pada kinerja generasi ketiga saat ini.

Salah satunya dengan mempersiapkan para pembaca masa depan dengan membuat “SwaraMuda” sebagai wahana gaul bagi anak muda. Selain memberikan ruang berekspresi untuk menulis, ia juga merintis kemunculan panggung SwaraMuda yang dapat digunakan anak-anak muda untuk berkiprah. Seperti yang diungkapkan oleh informan 1 bahwa,

“ dia ingin membawa koran ini pada komunitas yang lebih muda sebab pasar yang dibawa Pak Budi sudah banyak yang tidak produktif sebagai pembaca sementara pasar terus bertumbuh, maka posisi tersebut menjadikan koran ini di rasa perlu untuk melakukan transformasi kepada anak muda, misalnya dengan membuat layout yang lebih populer dan sebagainya”.

Selain membidik kaum muda, *Suara Merdeka* saat ini juga membuat beberapa rubrik yang dapat digunakan untuk mewakili kelokalan, yakni *Sang Pemomong* yang mengusung kebudayaan Jawa sebagai ikon penting dalam pemberitaan dan kajian yang diterbitkan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia (agar publik muda mudah memahami) dan bahasa Jawa (agar para pembaca tua merasa memiliki koran ini). Rubrik yang sudah ada sejak era Pak Budi Santoso ini lebih ditajamkan agar mampu menjadi wahana publik untuk melindungi kebudayaan lokal dari kepenuhan akibat kemajuan zaman.

Ada beberapa tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh *Suara Merdeka* generasi ketiga, yaitu kemajuan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi, masyarakat yang makin kritis dalam menyerap informasi dan persaingan bisnis media yang semakin bebas dan liberal. Oleh sebab itu sebagai

penerus generasi ketiga Kukrit mempunyai strategi untuk menghadapi tantangan sekaligus peluang tersebut yaitu dengan inovasi, kreativitas dan peningkatan keunggulan komparatif sekaligus kompetitif.

Inovasi akan mendorong *Suara Merdeka* selalu *up to date* dan mampu bermetamorfosis dalam kemajuan teknologi dan inovasi yang akan membuat *Suara Merdeka* selalu “ lahir kembali”. Sementara kreativitas akan membuat *Suara Merdeka* selalu peka terhadap perubahan selera, keinginan, kebutuhan, serta tuntutan dari masyarakat. Informan 3 mengatakan bahwa,

“*Suara Merdeka* secara terus-menerus mencoba untuk membaca kebutuhan masyarakat, dengan mengadakan riset, mengupdate kebutuhan pembaca dan secara periodik mencoba mengekspresikan kemauan pembaca melalui pemberitaan”.

Pada gilirannya inovasi dan kreativitas akan meningkatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga *Suara Merdeka* dapat memenangi sebuah persaingan, terlebih lagi persaingan bisnis yang kian bebas dan liberal seperti saat ini dan dalam menyiasati era konvergensi media *Suara Merdeka* berusaha mengembangkan bisnis-bisnis medianya, jadi kedepannya semua bidang media di *Suara Merdeka* harus mempunyai segala varian bisnis agar tidak ketinggalan dan kedepannya mungkin *Suara Merdeka* akan membuat serta meluncurkan surat kabar berskala lokal di semua kabupaten seperti *Harian Banyumas*, *Harian Muria* dan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan pembaca dari segmen menengah kebawah.

3.3 Sikap Profesionalisme sebagai kontrol

Sikap professionalisme mengacu pada sikap mental dalam membentuk sebuah komitmen dari para pekerja media untuk senantiasa dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Namun dibalik pembentukan sikap dan mental pekerja tersebut terdapat sebuah mekanisme kontrol yang dilakukan media terhadap para pekerjanya tanpa mereka sadari.

3.3.1 Mengukur sikap professionalisme pekerja media

Profesionalisme adalah perilaku, tujuan dan kualitas yang sangat tinggi dan konsisten yang memberi ciri kepada profesi seseorang. Dalam sebuah organisasi media perlu adanya sikap profesionalisme dari pekerja media. Jika tidak ada sikap professional dalam diri pekerja media maka hasil yang akan didapat perusahaan juga tidak akan maksimal. Kata professional sendiri telah memiliki makna khusus dalam masyarakat kita, di mana ketika para pekerja ingin mendapatkan status dan menunjukkan bahwa mereka mengetahui dan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, maka mereka senang menyebut diri sendiri “professional”. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat professionalisme dari pekerja media di *Suara Merdeka*. Menurut informan 4,

“ketika pekerja media menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya dengan baik dan mampu menjadi ruang publik bagi narasumbernya, otomatis kita menyebutnya professional”.

Secara keseluruhan pekerja media di *Suara Merdeka* sudah dikoridori oleh Kode Etik Jurnalistik dan UUD Pers No.40 tahun 1999, yang menjadi sebuah kesepakatan dan kesepakatan bersama seluruh pekerjaan jurnalisisme ditambah lagi dengan peraturan perusahaan untuk mengawal bisnis perusahaan agar tetap

berada pada kepentingan perusahaan, jadi secara otomatis semua pekerja media di *Suara Merdeka* harus taat dan tunduk terhadap peraturan tersebut. Selain dengan mematuhi peraturan yang berlaku, tingkat keprofesionalan pekerja juga dapat diukur melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh dewan pers terhadap para pekerja *Suara Merdeka* melalui lembaga-lembaga yang sudah dipercaya untuk melakukan sertifikasi, seperti PWI, Lembaga Pers Doktor Sutomo, LKBN Antara dan lain sebagainya. Jadi makin jelaslah ukurannya untuk wartawan dinilai professional atau tidak professional.

Makin seringnya pemberitaan pemilik muncul di medianya sendiri, seperti yang terjadi di *Suara Merdeka* saat pemiliknya menjadi kandidat ketua Kadin Jawa Tengah periode 2011-2016. Menjadikan ujian tersendiri bagi para pekerja untuk melihat seberapa profesionalnya mereka dalam bekerja. Sebab pemberian porsi pemberitaan bagi pemilik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan menjadi sebuah realitas. Disinilah seorang wartawan harus mampu bersikap professional, meskipun yang menjadi berita adalah pemilik dari tempat ia bekerja namun mereka harus membuat berita sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Informan 1, mengatakan bahwa,

“setiap pemberitaan yang terkait dengan pemilik, tidak perlu dilebih-lebihkan, jadi dibuat proporsional saja”.

Namun memang ketika wartawan *Suara Merdeka* mengangkat sebuah berita yang bersifat agak *sensitive* karena terkait dengan kelas yang berkuasa, maka berita yang wartawan dapatkan masih harus terlebih dahulu dikoordinasikan kepada pemilik. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan, apakah berita

yang akan dimuat sudah sesuai dengan yang pemilik inginkan apa belum. Jika tidak adanya instruksi atau konsultasi terlebih dahulu, artinya berita tersebut tidak ada masalah untuk di muat. Namun jika ada instruksi dari pemilik maka bisa saja berita tersebut, tetap dimuat meskipun dengan tampilan lebih *soft* atau bahkan tidak dimuat sama sekali.

Hal ini jelas mampu menghilangkan unsur objektivitas dan independensi dari pekerja media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Bukankah seharusnya media berada dalam posisi seimbang dalam memberitakan, dengan artian bahwa tidak melebih-lebihkan suatu pemberitaan ataupun juga tidak mengurangi substansi atau isi pemberitaan. Sekalipun hal tersebut berkaitan dengan kelompok dominan yang memiliki kuasa.

Menurut informan 3, sikap professional dari wartawan tidak bisa selalu diidentikan dengan kepatuhannya kepada peraturan yang berlaku sebab para pekerja yang patuh belum tentu dari sisi idealismenya kuat, tapi sebaliknya pekerja media yang punya sisi idealisme yang kuat kurang mampu mengekspresikan secara total dari realitas yang mereka hadapi, karena sesungguhnya kita berbicara tentang netralitas dan independensi media. Pemahaman yang benar adalah tentang bagaimana keberpihakan kita kepada kemaslahatan publik.

Pekerja media di *Suara Merdeka* bukanlah seorang seniman yang bebas dalam bekerja, pekerja tidak pernah bisa lepas dari kata organisasi dan dalam teknis bekerja mereka juga akan menerima tekanan-tekanan dan mau tidak mau

mereka harus mengikuti apa yang terjadi dalam organisasi termasuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, perintah-perintah dari pemimpin tertinggi, mekanisme kerja, termasuk harus bisa memenuhi tengat waktu deadline. Jadi dalam teknis bekerja, pekerja media tetap harus saling berkoordinasi dengan siapa-siapa yang ada didalam organisasi. Jadi seprofessional apapun seorang wartawan *Suara Merdeka* tidak mungkin tidak mengikuti sistem, dan sebegus apapun seorang wartawan membuat berita namun ternyata sistem tidak bisa menerima maka akhirnya berita tidak akan dimuat.

Sikap professional dalam beberapa aspek, kadang dirasakan dapat membatasi ruang gerak pekerja, meskipun memang sebagian besarnya menjaga pekerja agar tetap berada dalam jalur yang artinya memenuhi standar pers jurnalisme dan persyaratan hukum yang berlaku. Informan 5 menjelaskan bahwa,

“dalam praktek jurnalistik kita berada di dua kaki satu kaki di masyarakat satu kaki di hukum. Jadi harus ada tawar menawar dalam dua bidang tersebut dan memang diakui kadang-kadang dalam kasus tertentu bisa membatasi ruang gerak kita tapi apa boleh buat kita tidak bisa meninggalkan aspek hukum.”

Dalam implikasinya ruang gerak wartawan memang terbatas oleh hal-hal di luar kuasanya. Seperti faktor ekonomi, budaya dan lingkungan politik yang sangat berpengaruh pada sikap profesional yang dimiliki wartawan. Sehingga wartawan baru yang masih memiliki idealisme tidak lagi professional, ketika misalnya ia bekerja di perusahaan yang tidak sehat. Singkatnya, urusan profesionalisme menjadi tampak begitu rumit dalam prakteknya, sebab hal tersebut terkait dengan masalah internal perusahaan di mana wartawan itu bekerja.

3.4 Pembatasan Teknologi

Pembatasan teknologi maksudnya adalah pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya yang berkaitan dengan pemberian suatu alat yang dapat digunakan untuk memproses atau mengendalikan suatu masalah dengan lebih efisien. Pembatasan ini juga merupakan salah satu bentuk mekanisme kontrol yang dilakukan media terhadap pekerjanya, sebab dengan pembatasan ini pekerja akan mengalami hambatan.

3.4.1 Fasilitas bagi para pekerja media

Fasilitas yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Fasilitas dapat berupa benda-benda maupun uang. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media, *Suara Merdeka* memiliki manajemen organisasi yang tidak hanya memproduksi kerja berupa berita saja tapi juga mencakup pekerjaan administrasi perusahaan, teknis pencetakan, pemasaran, periklanan dan lainnya.

Bagian redaksional di *Suara Merdeka* merupakan bagian yang mengurus pemberitaan, manajemen kerjanya memiliki keunikan sebab tidak seperti pola kerja kepegawaian di sebuah lembaga usaha. Disiplin kerjanya terkait dengan waktu tengat naskah berita dicetak dan didistribusikan sampai diterima oleh pembaca pada waktu-waktu tertentu. Untuk itulah seorang pemimpin redaksi yang

membawahi bidang redaksional biasanya di bantu oleh berbagai jabatan redaksional serta para wartawan.

Setiap pekerja media di *Suara Merdeka*, mulai dari pemimpin redaksi hingga wartawan mendapatkan fasilitas dari perusahaan, seperti upah/gaji sampai sarana maupun prasarana seperti alat komunikasi, alat perekam, kamera, akses internet dan alat transportasi. Semua fasilitas tersebut diberikan agar memudahkan pekerja dalam menjalankan pekerjaan mereka dan tidak ada fasilitas khusus yang didapat ketika pekerja media meliput pemberitaan tentang pemilik.

Namun antara satu pekerja dengan pekerja lainnya bisa saja mendapatkan fasilitas yang berbeda, hal tersebut disesuaikan dengan jenjang karir mereka di perusahaan. Antara kepala editor dengan wartawan pasti berbeda. Selain itu antara satu perusahaan media dengan media lainnya pasti ada perbedaan sarana dan prasaranannya, jadi sebuah perusahaan media tidak bisa dijadikan patokan bagi perusahaan lainnya. Semua tergantung dari kekuatan financial dari masing-masing media. Ukuran koran nasional tentu akan berbeda dengan ukuran koran lokal.

Pemberian fasilitas ini juga berhubungan erat dengan kesejahteraan para pekerja, jika mereka mendapatkan fasilitas yang memadai, besar harapan mereka mampu memberikan loyalitas yang terbaik bagi perusahaan dan mampu menjaga sikap profesionalitas mereka dengan taat pada peraturan dan tidak menerima amplop dari manapun untuk menjaga independensi mereka meskipun memang hal tersebut terkadang susah untuk ditaati sebab defenisi amplop sendiri masih menjadi perdebatan diantara para wartawan, seperti apa saja pemberian dari

narasumber yang dapat dikategorikan sebagai amplop, pemberian akomodasi liputan (misalnya wartawan diberi fasilitas transportasi dan tempat menginap) apakah bisa dikategorikan sebagai amplop, Apakah pemberian barang souvenir dalam peluncuran acara produk bisa dikategorikan sebagai amplop dan lain sebagainya.

Dalam sebuah buku yang berjudul “*Potret Jurnalis Indonesia*” yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh AJI (Aliansi Jurnalis Independen) terhadap 400 orang responden wartawan yang tersebar di 17 kota di Indonesia mengenai pandangan wartawan tentang media dan jurnalis di Indonesia, ditemukan bahwa ada pemahaman yang keliru di kalangan wartawan mengenai amplop. Amplop masih dipersepsikan sebagai pemberian narasumber berupa uang. Untuk pemberian dalam bentuk lain seperti tiket gratis, akomodasi gratis dan sebagainya tidak dinilai sebagai amplop. Berbagai bentuk pemberian ini bisa saja mempengaruhi hasil liputan wartawan yang kemudian akan mempengaruhi independensi mereka.

Agar hal tersebut tidak terjadi atau paling tidak bisa diminimalkan maka perlu adanya perhatian khusus dari perusahaan. Misalnya menetapkan rumusan baku tentang standar upah wartawan dan lain sebagainya, sehingga jika standar telah ditetapkan namun masih ada wartawan yang masih menerima amplop dari narasumber, maka tindakan yang tepat untuk diberikan pada wartawan tersebut adalah pemecatan.

3.5 Pekerja bertujuan mencari kesenangan

Pekerja bertujuan mencari kesenangan maksudnya adalah setiap pekerja akan memainkan salah satu peran dari serangkaian orang dengan posisi yang berbeda di dalam organisasi media. Di mana masing-masing orang dan posisi saling bertarung agar pandangannya lebih diterima dan dapat mewarnai pemberitaan, jadi ibarat panggung drama, yang kuat maka merekalah yang berpeluang untuk menang dalam memaknai setiap peristiwa yang terjadi. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk mengontrol.

3.5.1 Cara wartawan memberitakan sebuah peristiwa

Cara wartawan memberitakan sebuah peristiwa maksudnya adalah bagaimana cara seorang wartawan dalam mempersepsikan sebuah peristiwa atau kejadian yang akan diliput. Seorang wartawan yang baik adalah seorang wartawan yang mampu memindahkan sebuah realitas kehidupan ke dalam sebuah berita. Jika ia bekerja secara profesional maka ia akan menyajikan realitas secara benar dengan menyingkirkan keberpihakannya dan mengikuti pilihan moral, sehingga apa yang diungkapkan adalah murni berdasarkan fakta. Meskipun sebuah realitas tergantung pada bagaimana sebuah fakta itu dipahami dan dimaknai oleh pekerja itu sendiri.

Setiap harinya ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan semuanya berpotensi untuk di jadikan berita, namun tetap saja ada banyak faktor yang menentukan kenapa sebuah peristiwa layak dianggap sebagai berita sementara yang lainnya tidak atau mengapa sebuah berita ditonjolkan sementara

berita yang lain dihilangkan. Semuanya dapat dilihat melalui rutinitas kerja keredaksionalan, dimana setiap harinya sebuah institusi media secara teratur menyeleksi dan memproduksi berita. Berita merupakan hasil akhir dari proses yang kompleks dimulai dari menyortir, menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam sebuah kategori tertentu.

Dalam memberitakan sebuah peristiwa atau kejadian, pekerja di *Suara Merdeka* dituntut agar dapat memberitakan secara *cover both side*, netral dan objektif. Informan 2 mengatakan bahwa,

“ketika pekerja media taat pada kode etik, maka mereka pasti akan memberitakan secara cover both side.”

Cover both side adalah liputan dua sisi untuk menekankan bahwa pekerja media tidak berpihak dan ia hanya bertugas sebagai juru warta yang menginformasikan apa adanya. Liputan dua sisi ini dilakukan dengan cara pendapat antara satu narasumber dengan narasumber yang lainnya dikontraskan jadi pekerja media tidak hanya mewawancarai satu narasumber tetapi juga dengan banyak narasumber yang saling bertentangan. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan akibat hukum karena berita tersebut.

Selain memberitakan secara *cover both side*, pekerja di *Suara Merdeka* juga harus bisa bersikap netral, artinya dalam menulis maupun mencari bahan berita, pekerja media tidak boleh berpihak pada satu kelompok manapun yang nantinya akan membuat berita menjadi tidak seimbang. Prinsip selanjutnya yang harus dimiliki oleh pekerja di *Suara Merdeka* adalah menghindari unsur subjektif dengan mengedepankan unsur objektif, dimana pekerja media harus mampu

menghindari masuknya opini pribadi ke dalam pemberitaan agar antara fakta dan opini tidak saling bercampur aduk. Apa yang diliput dan ditulis adalah apa yang terjadi dengan tidak melebih-lebihkan atau mengecilkan sebuah pemberitaan.

Namun memang terkadang seorang pekerja media tidak bisa menyembunyikan sifat keberpihakannya, sebab ia merupakan bagian intrinsik dalam pembentukan berita. Persoalannya adalah bukan wartawan yang tidak objektif namun struktur yang ada di luar wartawan tersebutlah yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu dan struktur tersebut secara umum menindas serta mampu mempengaruhi sebuah pemberitaan. Sebab wartawan seperti yang kita ketahui adalah bagian terkecil dari struktur sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar. Pengaruh pemilik dan politik kelas sangat mempengaruhi fakta apa yang harus diambil atau bagaimana sebuah berita dibahasakan.

Pengaruh pemilik dapat terlihat dari cara pekerja memberitakan sebuah berita yang terkait dengan pemilik, di mana akan terlihat adanya unsur pemihakan yang terjadi meskipun terkadang dibuat secara lebih soft, seperti yang dilakukan oleh pekerja media di *Suara Merdeka*, saat memberitakan kegiatan yang berhubungan dengan pemilik seperti dalam kasus pemberitaan tentang pemilihan ketua Kadin ini. Publik akan dengan mudah melihat unsur pemihakan tersebut dan hal inipun dibenarkan oleh Informan 1 bahwa,

“di akui atau tidak diakui pemihakan itu pasti ada sebab bagaimanapun Suara Merdeka adalah sebuah group. Group mempunyai kebijakan untuk bagaimana pemberitaan di media itu dilakukan, jadi pemihakan itu pasti ada.”

Jadi meskipun unsur pemihakan itu terlihat, namun tetap saja berita yang dimuat berdasarkan fakta. Menurut informan 4 yang membedakan antara berita pemilik dengan berita lainnya adalah hanyalah karena kesannya pemilik beberapa kali muncul sementara yang lain tidak, namun apa yang muncul tidak di besar-besarkan dan juga tidak dikurang-kurangi. Karena jika di besar-besarkan nantinya akan berbahaya bagi *Suara Merdeka* sendiri.

Pada dasarnya wartawan bukanlah hanya sebagai seorang pelapor yang meliput apa yang dia lihat, sebab disadari atau tidak ia menjadi seorang partisipan dari keberagaman penafsiran dan subjektifitas dalam publik. Wartawan tidak bisa dipandang sebagai subjek yang netral sebab ia membentuk sebuah realitas sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Wartawan dan pekerjaan jurnalistik yang dilakukannya tidak pernah dapat dilepaskan dari sistem kelas yang ada.

3.5.2 Porsi Pemberitaan bagi Pemilik

Porsi pemberitaan bagi pemilik merupakan bagian atau ruang dari halaman sebuah media yang diberikan secara khusus kepada pemilik atas dasar permintaan ataupun kesadaran dari para pekerjanya. Ruang atau bagian tersebut biasanya digunakan pemilik untuk mengekpos apapun yang berkaitan dengan dirinya yang dia anggap penting, biasanya hal ini berkaitan dengan sebuah pencitraan.

Realitas kekuatan pemilik memang bukanlah sebuah ilusi, sebab dalam sebuah struktur organisasi media lini teratas dipegang oleh pemilik yang dapat menentukan kebijakan sebuah media. Dengan kekuasaan yang di miliki, pemilik mampu melakukan berbagai kebijakan termasuk menekan para pekerja untuk

membawa media sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap independensi sebuah media. Suatu media dapat dikatakan independen apabila segala sesuatu yang berhubungan dengannya (seperti pemberitaan, kebijakan redaksi dan lain sebagainya) tidak dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk pemilik.

Belakangan ini seringkali kita membaca pemberitaan tentang pemilik media yang dimuat pada media yang dimilikinya sendiri dan hal tersebut memang tidak bisa terhindarkan lagi sebab sudah menjadi realitas pemilik di media manapun termasuk *Suara Merdeka*. Oleh sebab itu dalam mengelola media massa, seorang pemimpin redaksi dituntut cerdas dan harus pintar-pintar menjembatani agar kepentingan pemilik tetap dapat dilayani, tanpa mengganggu independensi dari media asuhannya.

Adanya kebijakan dan pemberian porsi pemberitaan bagi pemilik, mengakibatkan frekuensi dari pemunculan pemilik pada medianya sendiri sering terjadi, seperti yang bisa kita lihat di *Suara Merdeka* saat CEO *Suara Merdeka* tersebut menjadi kandidat ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Tengah periode 2011-2016, kita dapat melihat ada banyak sekali pemberitaan seputar CEO *Suara Merdeka* dalam pemilihan dirinya sebagai ketua Kadin Jawa Tengah dan pemberian porsi tersebut memang benar adanya. Informan 2, mengakui bahwa:

“ Ya.. kita beri porsi tersebut, seandainya ada competitor kita juga akan perlakukan sama, sayangnya kan tidak ada. Supaya kita bisa unjuk keberimbangan dalam format yang lebih tinggi”.

Hal ini dipertegas oleh pendapat dari informan 3 bahwa,

“inilah yang saya katakan sebagai realitas pemilik.. yang mendapatkan porsi yang berbeda, namun ada aspek-aspek kemaslahatan bagi publik yang dipancarkan melalui berita tersebut sebagai sebuah pesan, sebab aktifitas Kadin berhubungan dengan banyak kepentingan pengusaha yang merupakan bagian dari publik dan bukan hanya kepentingan pencitraan pemilik saja..”

Jadi, sebenarnya tujuan dari pemberian porsi pemberitaan terhadap pemilik seperti dalam kasus pemilihan ketua kadin ini bukanlah hanya sekedar untuk menyenangkan pemilik melainkan karena memang menurut informan 3 ada sebuah realitas pemilik yang membutuhkan pencitraan lewat berita itu. Pendapat tersebut diperkuat oleh informan 1, yang mengatakan bahwa,

“kaitan pemberian porsi tersebut bukan menyenangkan atau tidak menyenangkan pemilik, kaitannya adalah ini lebih dari instruksi. Dalam sebuah organisasi ketika ada instruksi dari atasan kepada bawahan, maka instruksi tersebut memang harus dilaksanakan”.

Selain karena adanya instruksi langsung dari pemilik yang meminta pemberian porsi, ada alasan lain yang dianggap sebagai suatu hal yang wajar oleh para pengambil kebijakan di *Suara Merdeka* yaitu menganggap bahwa wajar bagi pemilik untuk muncul di medianya karena beliau adalah seorang publik figure yang mempunyai peran penting di berbagai bidang organisasi di Jawa Tengah seperti organisasi Kadin ini. Berdasarkan anggapan itulah maka ketika ada pemberitaan yang terkait dengan pemilik yang dianggap memiliki kepentingan publiknya luas maka *Suara Merdeka* dengan senang hati akan membesarkan berita tersebut, apalagi jika berhubungan dengan perdagangan, ekonomi dan industri maka porsinya pasti besar. Jadi, sepanjang itu masih di ranah kepentingan publik, maka itu dianggap sah-sah saja dan yang penting tidak melanggar kode etik jurnalisisme yang sudah disepakati.

Menurut informan 2, hal inilah yang harus di cermati oleh publik, jadi publik diharapkan dengan sendirinya harus bisa membedakan antara Kukrit sebagai pribadi dengan Kukrit sebagai pemegang salah satu organisasi, meskipun kadangkala publik tidak mau tahu dengan hal itu. Namun menurutnya yang paling penting adalah visi apa yang sebenarnya ingin disampaikan jadi jangan dilihat siapanya tapi apa visi yang ingin disampaikannya kepada publik.

Namun terlepas dari itu semua, intinya memang alam saat ini menghendaki pencitraan itu penting, maka seorang pemilik yang mempunyai otoritas yang cukup besar dalam sebuah media, akan sangat mudah bagi mereka untuk memanfaatkan medianya sebagai ajang pencitraan. Sebab selain mengejar keuntungan ekonomi, secara ideal media juga berusaha menanamkan pengaruhnya kepada publik. Hal tersebut dilakukan karena media memiliki organisasi internal dengan sebuah tujuan dan keinginan-keinginan tertentu.

Hubungan antara pemilik modal dan media massa bukanlah semata-mata dipandang sebagai bentuk kerja dan praktek profesional, tetapi sebagai instrument pengontrol, di mana kelompok dominan dapat memaksakan dominasinya kepada kelompok lain yang tidak dominan.

3.5.3 Intervensi Pemilik

Ada banyak hal yang dapat mengakibatkan ancaman pada kebebasan pers, salah satunya pada kepemilikan media yang dikuasai hanya pada beberapa kelompok usaha besar baik yang berskala nasional ataupun lokal dan salah satu

bentuk ancaman bagi kebebasan pers dalam menyampaikan berita adalah, adanya intervensi dari pemilik media dapat mengakibatkan adanya distorsi.

Intervensi pemilik adalah sebuah istilah dalam industri media dimana pemilik modal atau pemilik media mencampuri urusan redaksional yang sebenarnya bukan merupakan urusan pemilik, sebab segala urusan yang berhubungan dengan redaksional sudah ada pemimpin redaksi sebagai pengambil kebijakan. Intervensi merupakan sesuatu yang dibenci oleh para pekerja media sebab pola intervensi ini dapat mengganggu kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Padahal berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, tidak ada lagi intervensi yang dibenarkan dari pihak manapun terhadap media massa. Meski demikian, bukan berarti pers bisa sepenuhnya menikmati kebebasan menyampaikan informasi kepada publik, sebab masih ada sejumlah pengusaha media yang menggunakan medianya hanya untuk menyuarakan kepentingannya dan kelompoknya dengan melupakan kepentingan publik.

Memang sulit di pungkiri bahwa independensi media saat ini mulai diragukan oleh publik yang makin kritis dalam menilai media. Tidak jarang sebuah pemberitaan di media massa merupakan “pesanan” dari pihak-pihak tertentu untuk melancarkan kepentingan mereka, apalagi jika pihak tertentu tersebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemilik, seperti koleganya atau mungkin pengiklan dan lain sebagainya. Sebuah berita yang membawa

dampak buruk bagi pihak tertentu dengan adanya intervensi, maka berita tersebut bisa tidak dimuat atau meskipun dimuat tapi berita tersebut akan dikemas sedemikian rupa sehingga bisa jadi esensi dari beritanya tidak akan terlihat.

Sesungguhnya semua media termasuk *Suara Merdeka* pasti memiliki pengalaman tersebut meskipun intensitasnya berbeda-beda antara satu media dengan media lainnya. Informan 3 menegaskan bahwa di *Suara Merdeka* hal ini banyak sekali terjadi sebab,

“ inilah psikologi kekuasaan di suatu region, ketika sebuah media massa menguasai pasar di suatu region, berita apapun yang dimuat di media tersebut akan mempunyai dampak psikologis yang lebih berat di bandingkan jika berita tersebut dimuat di media lain. Oleh sebab itu mereka (pihak tertentu yang punya kepentingan) akan melakukan segala cara untuk mengintervensi itu demi kepentingan-kepentingan itu dan ketika pemilik modal atau pemilik perusahaan memiliki kepentingan yang sama, maka akan ada saling mengamankan, saling support dan akhirnya intervensi itu sangat niscaya terjadi dan itu adalah sebuah realitas.”

Pernyataan di atas kemudian diperkuat oleh informan 5, bahwa

“ intervensi dari pemilik itu ada. Biasanya jika ada kasus besar. Berita tetap dimuat tetapi tidak di headline, misalnya dimuat pada halaman 12 dengan 3 kolom, jadi sebisa mungkin tetap dimuat meskipun penekanannya tidak bisa muncul di headline dan dari isinya sama.”

Intervensi dapat dengan mudah dilakukan, sebab adanya hubungan yang baik antara pemilik dengan pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Namun pasti ada batasan-batasannya dimana media tersebut tidak bisa lagi membantu menutup-nutupinya sebab masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam melihat fenomena intervensi ini. Di tambah lagi dengan banyaknya media lain yang memberitakannya dengan sangat terbuka, dan akhirnya membuat media tersebut tidak bisa membantu menyembunyikannya lagi. Namun inilah realitas

yang terjadi di media saat ini. Jadi tidak hanya ditingkat nasional saja, pada tingkat lokal pun intervensi kerap kali terjadi.

Hal ini jelas dapat mengganggu independensi dan obyektifitas dari media, karena bisa saja ada informasi yang ditambah atau bahkan disembunyikan, jelas ini melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Kemampuan yang dimiliki oleh media massa dalam mempengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat dalam menilai sebuah informasi, sepertinya telah menggoda banyak pihak untuk melakukan politisasi informasi.